

**ANALISIS PEMERATAAN PENDIDIKAN DI JAWA TENGAH DAN KALIMANTAN TIMUR
BERDASARKAN FASILITAS, GURU, DAN AKSES PENDIDIKAN**

Candra Fitri Darmawati¹, Hunafa Faza Azka², Arsia Setyaning Utami³, Rindi Sulistyawati⁴
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi,
Universitas Negeri Semarang, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: candrafitri811@students.unnes.ac.id,
hunagamaster6@students.unnes.ac.id, arsiasnntutami@students.unnes.ac.id,
rindsuliss@students.unnes.ac.id

ABSTRACT

Educational equity is a fundamental component of national development; however, disparities among regions in Indonesia remain a persistent challenge. This study aims to analyze the equity of basic education in Central Java and East Kalimantan based on three main indicators: educational facilities, teacher availability and distribution, and access to education. The study employs a qualitative approach using a literature review method by examining secondary data from academic journals, official reports, and relevant scholarly publications. The findings indicate that Central Java has advantages in terms of the number of schools, classrooms, and accessibility supported by relatively adequate infrastructure, although issues related to facility quality remain evident. Meanwhile, East Kalimantan faces more complex challenges due to its vast geographical conditions, limited internet access, and uneven teacher distribution, particularly in remote areas. Although the academic qualifications of teachers in both provinces are relatively comparable, the proportion of certified teachers remains low. It can be concluded that educational equity has not yet been fully achieved, and region-specific policies are required to ensure fairness and equal access to quality basic education services.

Keywords: *educational equity, educational facilities, teacher distribution, educational access, basic education.*

ABSTRAK

Pemerataan pendidikan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan nasional, namun hingga kini masih menghadapi berbagai tantangan antardaerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemerataan pendidikan dasar di Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur berdasarkan tiga indikator utama, yaitu fasilitas pendidikan, ketersediaan dan distribusi guru, serta akses pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan resmi, dan publikasi akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Jawa Tengah unggul secara kuantitas dalam jumlah sekolah, ruang kelas, dan akses pendidikan yang didukung infrastruktur relatif memadai, namun masih menghadapi permasalahan kualitas fasilitas. Sementara itu, Kalimantan Timur mengalami kendala pemerataan yang lebih kompleks akibat kondisi geografis, keterbatasan akses internet, dan distribusi guru yang belum merata, terutama di wilayah pedalaman. Meskipun kualifikasi akademik guru di kedua provinsi relatif setara, tingkat sertifikasi guru masih tergolong rendah. Disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai dan memerlukan kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah guna menjamin keadilan dan kesetaraan layanan pendidikan dasar.

Kata kunci: pemerataan pendidikan, fasilitas pendidikan, distribusi guru, akses pendidikan, pendidikan dasar.

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagiarism Checker No 736
Prefix DOI: Prefix DOI:
10.8734/sindoro.v1i2.360
Copyright: Author
Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah bekal untuk hidup bagi setiap manusia. Pendidikan merupakan segala aktivitas yang dilakukan atau diusahakan oleh sebuah lembaga kepada peserta didik untuk diberikan kepadanya dengan harapan dapat memiliki kompetensi, dan kesadaran penuh (Pristiwanti et al. 2022). Menurut Jailani (2024) pendidikan adalah suatu proses sosial yang membantu anak atau individu dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat dan zaman. Melalui pendidikan manusia tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi membentuk karakter dan moralitas yang sesuai dengan nilai budaya dan kebutuhan sosial. Menurut Niazi (2025) pendidikan adalah foundation of individual growth and social progress, yaitu fondasi utama pertumbuhan individu dan kemajuan sosial. Melalui pendidikan, individu memperoleh keterampilan berpikir kritis, kemampuan beradaptasi serta nilai kemanusiaan yang dibutuhkan untuk pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Menurut Ki hajar dewantara, “pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuh anak; maksudnya pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi - tingginya.” Menurut undang Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.” Sehingga dapat dipahami bahwa pendidikan adalah proses sadar, sistematis, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia baik dari aspek spiritual, intelektual, moral, sosial, maupun keterampilan. Hal tersebut bertujuan supaya individu mampu hidup bermartabat, berakarakter, serta berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain sebagai pengembangan potensi individu, pendidikan juga berperan sebagai alat atau sebuah usaha untuk menjadi suatu negara maju. Seperti yang diungkapkan Pal (2023) bahwa pendidikan berperan sebagai katalis yang meningkatkan produktivitas dan mendorong kemajuan teknologi dan memperkuat ekonomi nasional secara berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin besar pula kontribusi mereka terhadap peningkatan sektor sektor ekonomi. Menurut Ozturk (2024) pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan kemajuan suatu negara, karena meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta adopsi teknologi baru. Melalui pendidikan, negara dapat memperkuat basis pengetahuan dan inovasi yang menjadi kunci utama kemajuan bangsa. Trinh (2025) Menyatakan bahwa pengeluaran dan investasi dalam pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Menurut trnh, pendidikan dapat menghasilkan SDM yang inovatif produktif sehingga dapat berperan dalam meningkatkan daya saing nasional dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Chotai (2025) Menyatakan bahwa pendidikan merupakan driver utama pembangunan ekonomi, karena mampu mengurangi ketimpangan, meningkatkan mobilitas sosial, serta memperluas kesempatan kerja. Pendidikan menjadi sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup serta mempecepat proses menuju negara maju dan mandiri. Namun, kemajuan suatu bangsa tidak dapat diraih apabila pendidikan tidak merata secara penuh. Baik itu akses pendidikan, kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan. Apabila hal tersebut menjadikan sebuah ketimpangan, maka akan menjadi penghambat dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan seharusnya menjadi fokus utama pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu utama dalam pembangunan

nasional di Indonesia. Meskipun pemerintah berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui berbagai program, kesenjangan antarwilayah masih terjadi. Kesenjangan tersebut terlihat di antara perkotaan dan pedesaan, serta antara Indonesia bagian barat, dan bagian timur. Ketimpangan ini mencakup aspek fasilitas, ketersediaan tenaga pendidik, dan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar. Hal tersebut menjadi sumber utama masalah pemerataan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan penelitian Sihombing (2022) menemukan bahwa disparitas pendidikan antarprovinsi di Indonesia masih tinggi, terutama terkait dengan distribusi guru dan sarana belajar. Fatricia et al. (2025) juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau daerah - daerah terpelosok karena kendala geografis dan infrastruktur. Selain itu, Muchtar et al. (2025) mengungkapkan bahwa ketimpangan pendidikan di daerah 3T disebabkan oleh kurangnya tenaga pengajar berkualitas dan minimnya dukungan fasilitas pembelajaran. Ketidakmerataan pendidikan ini tidak hanya berdampak pada mutu belajar, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan manusia yang berkeadilan (Hasanah, 2025; Fadilah et al. (2025)). Terlebih lagi, undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan merupakan amanat konstitusional yang harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan dan implementasi yang baik dan menyeluruh seluruh wilayah Indonesia. Supaya, setiap warga negara benar benar telah mendapatkan akses pendidikan yang baik.

Pemerataan pendidikan hingga kini masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan dalam pembangunan nasional. Berdasarkan penelitian Baharudin et al. (2025) menemukan bahwa pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perbedaan kondisi wilayah urban dan rural. Daerah urban adalah daerah kota yang di mana menjadi tempat bagi berbagai manusia yang pergi meninggalkan daerah asalnya. Daerah rural adalah daerah dengan lahan terbuka yang luas, atau biasa disebut sebagai pedesaan. Menurut Baharudin, guru yang mengajar di daerah pedesaan mendapatkan berbagai keterbatasan fasilitas belajar, minimnya sumber daya, serta akses terhadap teknologi pendidikan yang terbatas. Sehingga, hal tersebut membuat implementasi kebijakan pendidikan tidak berjalan merata di seluruh wilayah. Sementara, guru di daerah kota mendapatkan akses dan dukungan memadai, sebaliknya guru di daerah pedesaan seringkali mengajar dengan berbagai keterbatasan yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran. Selain itu, pada temuan Ayuningtyas (2021) pendidikan di daerah pedesaan belum merata, hal tersebut terjadi akibat kondisi geografis yang menantang dan sebaran penduduk yang tidak merata. Banyak sekolah di wilayah pedalaman menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana seperti, ruang kelas, media pembelajaran, serta akses transportasi ke sekolah. Selain dari faktor geografis, terdapat faktor lain yang menjadi penghambat seperti kesenjangan pendidikan dikarenakan latar belakang ekonomi, dan kekurangan guru kompeten. Pasalnya, di daerah pedesaan, masih terdapat guru yang hanya lulusan SMA, sehingga, proses pedagogis tidak berjalan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat diketahui dan dipahami bahwa pendidikan belum sepenuhnya merata di Indonesia. Kesenjangan distribusi guru, sarana dan prasarana, kondisi geografis menyebabkan kesenjangan kian menguat apabila tidak ditemukan solusinya. Terlebih lagi, wilayah 3T dan daerah perkotaan memiliki perbedaan yang mencolok, sehingga program wajib belajar 12 Tahun akan sulit mencapai keberhasilan apabila pemerataan tidak menjadi objek utama pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, pada pembahasan atau dalam artikel ini berfokus untuk menganalisis pemerataan pendidikan di Jawa Tengah dan Kalimantan Timur dengan meninjau tiga indikator utama, yakni: Fasilitas pendidikan, ketersediaan serta distribusi guru, dan akses pendidikan yang berkaitan dengan geografi. Pemilihan kedua provinsi ini didasarkan pada perbedaan karakter wilayah dan kondisi demografis, sekaligus relevan dengan dinamika pembangunan di Kalimantan Timur yang berpotensi memengaruhi kebutuhan layanan pendidikan.

Melalui kajian dari berbagai sumber ilmiah dan data sekunder yang relevan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran perbandingan kondisi pemerataan pendidikan pada kedua wilayah serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya penyusunan kebijakan pemerataan pendidikan yang lebih tepat sasaran

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai jurnal, artikel ilmiah, serta publikasi akademik yang membahas pemerataan pendidikan, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak melakukan pengambilan data langsung di lapangan, melainkan mengkaji hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti. Melalui cara ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai kondisi pemerataan pendidikan berdasarkan berbagai sudut pandang dan temuan yang telah ada. Jurnal dan sumber ilmiah yang digunakan dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian isi dengan fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut membahas topik pemerataan pendidikan, perbedaan fasilitas pendidikan antarwilayah, ketersediaan dan distribusi guru, serta akses masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, penelitian yang menyoroti perbedaan kondisi pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah yang maju dan tertinggal, juga dijadikan bahan kajian karena relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Sebagian besar sumber data yang digunakan merupakan jurnal yang terbit dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini bertujuan agar data dan hasil penelitian yang dianalisis masih sesuai dengan kondisi pendidikan saat ini dan kebijakan yang sedang berlaku. Namun demikian, beberapa sumber yang lebih lama tetap digunakan apabila dianggap masih relevan untuk memperkuat landasan teori serta pemahaman mengenai pemerataan pendidikan. Seluruh sumber tersebut kemudian dikaji untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai permasalahan pemerataan pendidikan, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.

HASIL PENELITIAN

Indikator Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan data sekunder yang dianalisis, antara Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam ketersediaan dan kondisi fasilitas pendidikan dasar. Jawa Tengah memiliki 18.597 sekolah SD/MI, jauh lebih banyak daripada Kalimantan Timur yang hanya memiliki 1.944 sekolah. Perbedaan ini terkait dengan demografi dan kepadatan penduduk: Jawa Tengah adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia, sementara Kalimantan Timur memiliki wilayah yang luas dengan populasi yang lebih sedikit. Kesenjangan yang sama juga ditemukan dalam jumlah ruang kelas. Jumlah ruang kelas di Jawa Tengah adalah 135.132, sedangkan di Kalimantan Timur hanya 18.186. Kondisi ini menunjukkan secara kuantitas bahwa daya tampung pendidikan dasar di Jawa Tengah lebih besar dan lebih merata. Namun demikian, kedua provinsi masih menghadapi masalah dalam hal kualitas ruang kelas. Di Jawa Tengah, hanya 35,4% ruang kelas yang baik, dengan proporsi ruang kelas rusak ringan 32,4%, rusak sedang 22,1%, dan rusak berat 10,2%. Di Kalimantan Timur, 54,5% ruang kelas rusak baik, sedangkan sisanya rusak ringan (24,1%), rusak sedang (12,8%), dan rusak berat (8,6%). Data menunjukkan bahwa, meskipun Jawa Tengah

unggul secara kuantitas, kualitas infrastruktur ruang kelas masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan.

Kedua provinsi telah mencapai cakupan yang tinggi dalam hal ketersediaan listrik. Di Jawa Tengah, hampir semua sekolah SD/MI telah memiliki listrik, sebanyak 18.593 sekolah (100%), dengan hanya 4 sekolah (0,0%) yang belum memilikinya. Di Kalimantan Timur juga, 1.921 sekolah (98,8%) telah memiliki listrik, tetapi masih ada 23 sekolah (1,2%) yang belum memilikinya. Kehadiran listrik ini sangat penting untuk mendukung pendidikan, terutama dalam hal penggunaan teknologi pendidikan. Namun, perbedaan kembali terlihat pada pengukuran ketersediaan internet. Di Jawa Tengah, 17.815 sekolah (95,8%) memiliki akses internet, sementara 782 sekolah (4,2%) belum. Di Kalimantan Timur, hanya 1.526 sekolah (78,5%) memiliki akses internet, dan 418 sekolah (21,5%) belum. Akses internet yang terbatas di Kalimantan Timur menunjukkan hambatan struktural yang berasal dari lingkungan geografis, jarak antar sekolah, dan keterbatasan infrastruktur jaringan. Ini terjadi terutama di wilayah pedalaman. Pada umumnya, fasilitas pendukung lainnya, seperti toilet, air bersih, perpustakaan, dan laboratorium, lebih mudah ditemukan dan tersebar di Jawa Tengah. Hal ini tidak terlepas dari wilayah yang padat, aksesibilitas yang baik, dan kecepatan penyerapan dana pendidikan. Sebaliknya, kualitas layanan pendidikan dasar tidak seragam di antara wilayah di Kalimantan Timur karena jarak sekolah yang jauh dan perbedaan kondisi antar-kabupaten yang menyebabkan variasi fasilitas yang cukup besar.

Indikator Guru

Indikator tenaga pendidik menunjukkan bahwa jumlah guru SD/MI di Jawa Tengah jauh lebih banyak dibandingkan di Kalimantan Timur. Jumlah guru di Jawa Tengah sebanyak 167.119 orang, sedangkan di Kalimantan Timur hanya 27.106 orang. Perbedaan ini disebabkan oleh jumlah sekolah dan siswa di masing-masing provinsi. Jumlah siswa per guru di kedua provinsi, bagaimanapun, tidak terlalu berbeda. Rasio murid-guru di Jawa Tengah adalah 15,4, sedangkan di Kalimantan Timur adalah 15,6, yang masing-masing masih berada di bawah standar. Namun demikian, angka rata-rata tersebut belum sepenuhnya menggambarkan situasi nyata di lapangan. Di Jawa Tengah, rasio murid-guru cenderung lebih tinggi di wilayah perkotaan karena konsentrasi penduduk, sementara di Kalimantan Timur, masalah utama adalah kekurangan guru di wilayah pedalaman dan terpencil. Di Jawa Tengah, proporsi guru ASN adalah lebih tinggi, sekitar 80%, dengan 20% guru non-ASN. Di Kalimantan Timur, proporsi guru ASN adalah lebih rendah, sekitar 70%, dan 30% guru non-ASN. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah relatif lebih stabil dalam pemenuhan tenaga pendidik berstatus tetap, sedangkan Kalimantan Timur masih sangat bergantung pada guru non-ASN, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Kedua provinsi memiliki kualifikasi pendidikan yang sebanding. Secara akademik, kualitas dasar guru di kedua provinsi relatif setara. Di Kalimantan Timur, 97,7% guru SD/MI memiliki kualifikasi minimal D4/S1, dan 2,3% memiliki kualifikasi di atas D4/S1. Di Jawa Tengah, 98,8% guru memiliki kualifikasi minimal D4/S1, dan 1,2% memiliki kualifikasi di atas D4/S1. Data ini menunjukkan bahwa kualitas dasar guru di kedua provinsi relatif setara. Namun, dalam hal sertifikasi pendidik, ada perbedaan yang signifikan. Di Kalimantan Timur, hanya 36% guru yang memiliki sertifikat, sedangkan 64% belum. Di Jawa Tengah, 46% guru memiliki sertifikat pendidik, dan 54% belum. Ini menunjukkan bahwa akses terhadap program pengembangan profesional guru terbatas, terutama bagi guru yang bekerja di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.

Indikator Akses Pendidikan

Untuk mengukur ketidaksamaan dalam layanan pendidikan dasar, akses pendidikan merupakan faktor penting. Jawa Tengah memiliki keunggulan geografis karena kepadatan

permukiman yang tinggi dan infrastruktur transportasi yang memadai, serta jarak rata-rata ke sekolah yang relatif dekat. Selain itu, rasio sekolah per km² di Jawa Tengah lebih tinggi, sehingga siswa biasanya tidak perlu perjalanan jauh untuk pergi ke sekolah. Sebaliknya, masalah akses yang lebih kompleks muncul di Kalimantan Timur. Karena wilayahnya yang luas dan terdiri dari hutan, sungai, pantai, dan kawasan pertambangan, jarak antarsekolah menjadi jauh dan sulit dijangkau. Di beberapa daerah pedalaman, siswa harus menempuh perjalanan yang panjang dengan hanya beberapa pilihan transportasi. Ini dapat menyebabkan penurunan partisipasi siswa dalam sekolah. Ini ditunjukkan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) SD di kedua provinsi. APK SD di Kalimantan Timur sebesar 104,7%, sedangkan APK SD di Jawa Tengah sebesar 100,8%. APK yang melebihi 100% menunjukkan adanya siswa yang tidak sesuai dengan kelompok usia ideal, yang dapat disebabkan oleh pengulangan kelas atau keterlambatan masuk sekolah. Meskipun APK yang lebih tinggi ditemukan di Kalimantan Timur, hal ini tidak serta-merta menunjukkan pemerataan akses yang lebih baik; sebaliknya, hal ini dapat menunjukkan ketidakteraturan jalur pendidikan yang disebabkan oleh kendala sosial dan geografis. Selain itu, Jawa Tengah lebih unggul dalam menjaga keberlanjutan pendidikan dasar karena aksesibilitas yang lebih baik dan dukungan infrastruktur yang lebih merata. Namun, hambatan akses di Kalimantan Timur berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, terutama di daerah dengan transportasi yang terbatas dan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor informal. Selain itu, Jawa Tengah lebih unggul dalam menjaga keberlanjutan pendidikan dasar karena aksesibilitas yang lebih baik dan dukungan infrastruktur yang lebih merata. Namun, hambatan akses di Kalimantan Timur berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, terutama di daerah dengan transportasi yang terbatas dan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor informal.

Tabel Perbandingan

	Jawa Tengah				Kalimantan Timur			
Jumlah sekolah SD/MI	18.597				1.944			
Jumlah ruang kelas	135.132				18.186			
Kondisi ruang kelas	Baik	Rusak ringan	Rusak sedang	Rusak berat	Baik	Rusak ringan	Rusak sedang	Rusak berat
	35,4%	32,4%	22,1%	10,2%	54,5%	24,1%	12,8%	8,6%
Ketersediaan listrik	Tersedia		Tidak tersedia		Tersedia		Tidak tersedia	
	18.593 (100%)		4 (0,0%)		1.921 (98,8%)		23 (1,2%)	
Ketersediaan akses internet	Tersedia		Tidak Tersedia		Tersedia		Tidak tersediia	
	17.815 (95,8%)		782 (4,2%)		1.526 (78,5%)		418 (21,5%)	
Jumlah guru SD/MI	167.119				27.106			
Rasio murid per guru	15,4				15,6			
Status guru	ASN		Non ASN		ASN		Non ASN	
	80%		20%		70%		30%	
Kualifikasi pendidikan	≥ D4/S1		> D4/S1		≥ D4/S1		> D4/S1	
	98,8%		1,2%		97,7%		2,3%	

Guru bersertifikat pendidik	sudah tersertifikasi	belum terertifikasi	sudah tersertifikasi	belum terertifikasi
	46%	54%	36%	64%
APK SD	100,8%		104,7%	

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan dasar antara Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Timur masih belum sepenuhnya tercapai. Jawa Tengah memiliki keunggulan dalam jumlah sekolah, ruang kelas, serta kemudahan akses pendidikan yang didukung oleh kepadatan penduduk dan infrastruktur yang relatif memadai. Namun demikian, kualitas fasilitas pendidikan di Jawa Tengah masih menghadapi permasalahan, khususnya pada kondisi ruang kelas yang banyak mengalami kerusakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana secara kuantitatif, tetapi juga menuntut peningkatan kualitas agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal.

Sementara itu, Kalimantan Timur menghadapi tantangan pemerataan pendidikan yang lebih kompleks akibat kondisi geografis yang luas dan aksesibilitas yang terbatas. Keterbatasan jumlah sekolah, rendahnya akses internet, serta distribusi guru yang belum merata, terutama di wilayah pedalaman, menjadi faktor utama yang menghambat pemerataan pendidikan. Meskipun kualifikasi akademik guru di kedua provinsi relatif setara, rendahnya tingkat sertifikasi guru dan kendala akses pendidikan di Kalimantan Timur berpotensi memengaruhi keberlanjutan dan kualitas layanan pendidikan dasar. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pemerataan pendidikan perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah agar mampu menjamin keadilan dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah lebih memfokuskan kebijakan pemerataan pendidikan pada peningkatan kualitas fasilitas pendidikan, pemerataan distribusi dan pengembangan profesional guru, serta perluasan akses pendidikan berbasis kondisi geografis daerah. Penguatan infrastruktur, penyediaan akses internet, serta pemberian insentif bagi tenaga pendidik di wilayah terpencil diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pemerataan pendidikan dengan indikator yang lebih beragam dan menggunakan data yang lebih mendalam agar dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ayuningtyas, I. (2021). *Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 6(2), 112-124. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v6i2.2128>

Badan Pusat Statistik. (2024). Jumlah sekolah, guru, dan murid Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menurut provinsi, 2024/2025. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). Neraca pendidikan daerah Provinsi Jawa Tengah 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2024). Neraca pendidikan daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

- Baharuddin, B., & Burhan, M. (2025). *Urban and rural teacher perspectives on Indonesian educational reform: Challenges and policy implications*. Cogent Education, 12(1), 1-15. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2497142>
- Fadillah, R., Desmaryani, R., & Lestari, A. (2025). Analisis ketimpangan sarana dan prasarana pendidikan di daerah pedesaan. Jurnal Adijaya Multidisiplin.
- Patricia, A. N., Febriani, S., & Ananda, R. (2025). Kebijakan dan permasalahan akses pendidikan dasar di Indonesia. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar.
- Hasanah, R. (2025). Ketimpangan akses pendidikan di Indonesia: Tantangan dan solusi. Wicarana: Jurnal Kependidikan.
- K, N., & Chotai, D. N. A. (2025). *The role of education in socio-economic development: A gender perspective in India*. Journal of Marketing & Social Research, 2(2), 87-108. <https://doi.org/10.61336/jmsr/25-02-13>
- Mashuri, M., Jailani, M. S., & Isma, A. (2024). Perubahan sosial dan pendidikan. Dirasah, 7(2), 692-701.
- Muchtar, C. O., Purba, A. A., Sitorus, J. S., Siagian, M. F., Harahap, N. M., Ginting, R. A., Bangun, M. B., & Muchtar, Z. (2025). *Systematic literature review: Examining Indonesia's educational inequality factors and government equity policies*. International Journal of Educational Practice and Policy, 3(1), 8-16. <https://doi.org/10.61220/ijepp.v3i1.0257>
- Niazi, A. (2025). *Education is the foundation of individual growth and social progress*. Integrated Journal for Research in Arts and Humanities (I JRAH), 5(4), 80-83. <https://doi.org/10.55544/ijrah.5.4.11>
- Ozturk, I. (2024). *The role of education in economic development: A theoretical perspective*. Journal of Rural Development and Administration.
- Pal, L. C. (2023). Impact of Education on Economic Development. Khazanah Pendidikan Islam, 5(1), 10-19. <https://doi.org/10.15575/kp.v5i1.25199>
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(6), 7911-7915. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9498>
- Sihombing, R. (2022). Pemerataan pendidikan: Studi kasus 34 provinsi di Indonesia. PEDR: Jurnal Pendidikan dan Riset.
- Trinh, L. D. T. (2025). *The impact of education expenditure on economic growth in the Southeast Asia region*. Knowledge and Performance Management, 9(1), 148-159. [http://dx.doi.org/10.21511/kpm.09\(1\).2025.11](http://dx.doi.org/10.21511/kpm.09(1).2025.11)